



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS ANDALAS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **INDRA DWIPA**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **182330**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.330.000.000**

1. Tanah Seluas 429 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , Rp. 175.000.000
3. Tanah Seluas 54.244 m2 di KAB / KOTA BENGKULU UTARA, Rp. 240.000.000
4. Tanah Seluas 54.933 m2 di KAB / KOTA BENGKULU UTARA, Rp. 240.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 226 m2/36 m2 di NEGARA [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 130.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOBIL, TOYOTA HARDTOP JEEP Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 575.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 1.982.508.180**

F. HARTA LAINNYA **Rp. 67.000.000**

Sub Total **Rp. 4.084.508.180**



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

4.084.508.180

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.